

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca krisis global yang memuncak pada triwulan IV tahun 2008 yang dipicu oleh krisis kredit perumahan dan bangkrutnya beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, Indonesia mengalami gejolak ekonomi. Dampak dari krisis ini, Indonesia mengalami efek negatif yaitu yang pertama, kinerja neraca pembayaran yang turun. Kedua, terdapat tekanan terhadap nilai rupiah, dan yang ketiga terdapat dorongan laju inflasi (Didik Kurniawan, 2008). Keadaan ini mengganggu perekonomian Indonesia yang tergolong masih menjadi negara berkembang di dunia.

Dengan terguncangnya perekonomian Indonesia pada saat itu, sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak negatif karena mengalami kesulitan likuiditas. Sektor perbankan menjadi sektor yang rentan karena berhubungan dengan tingkat kepercayaan atas pengembalian dana di waktu mendatang. Kelangkaan likuiditas mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian sehingga terjadi juga penurunan kapasitas permintaan dan produksi pada sektor riil yang berdampak terdepresiasinya nilai rupiah, tekanan inflasi yang tinggi serta meningkatnya suku bunga.

Untuk menghindari kerugian yang lebih dalam akibat krisis, pada tahun 2009 pemerintah mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi yang terjadi. Sebagai bank sentral yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia menaikkan *BI Rate* untuk menahan laju inflasi yang tinggi, serta adanya inovasi pembayaran sekaligus pengawasan untuk memperkecil risiko gagal bayar (www.setneg.go.id). Kebijakan Bank Indonesia ini diperuntukkan kepada perbankan yang dianggap sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat yang melalui lembaga keuangan.

Lembaga keuangan seperti perbankan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dengan menjalankan kegiatannya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari debitur ke kreditur, bank membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan usahanya dan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian negara. Dengan adanya fungsi ini, negara memanfaatkan lembaga keuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi untuk bangkit dari keterpurukan yang terjadi.

Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam melakukan kegiatannya turut tergoncang akibat terjadinya krisis. Hal ini dikarenakan pemicu utama krisis itu sendiri ialah suku bunga. Tingkat suku bunga yang fluktuatif dan nilainya mengalami peningkatan yang cukup tinggi adalah penyebab krisis yang terjadi dalam sistem perekonomian yang selama ini diterapkan.

Berbeda dengan sistem yang digunakan oleh bank konvensional, bank syariah dalam melakukan kegiatannya melarang adanya prinsip bunga. Namun dengan adanya sistem ini, pemerintah justru mulai menyadari bahwa ketahanan bank syariah lebih unggul dibanding bank konvensional terhadap krisis. Heri Sudarsono (2009) mengungkapkan prinsip yang digunakan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga dalam melakukan kegiatannya, menjadikan bank syariah dapat bertahan dari fluktuasi tingkat bunga yang disebabkan turunnya nilai rupiah.

Dalam rangka mewujudkan dukungannya terhadap bank syariah, pemerintah merumuskan merumuskan “*Grand Strategy* Pembangunan Pasar Perbankan Syariah”. Langkah yang telah dilakukan pertama, menerapkan visi baru dan membangun pemahaman perbankan syariah melalui *beyond banking* dengan menetapkan target aset dan pertumbuhan industri. Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah. Keempat, program pengembangan variasi produk yang ditawarkan. Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah. Dan keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (SPI, 2008).

Berikut hasil strategi yang telah dirumuskan pemerintah dalam peningkatan aset :

Tabel 1. 1
Total Aset Perbankan Syariah

Periode	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Target aset (t)	50	87	24	150	200	250	257
Aset yang dicapai (t)	49,5	58	100,3	149	199,7	244	250,5

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2008-2014 yang dipublikasi dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (data diolah).

(t) : dalam satuan triliun rupiah

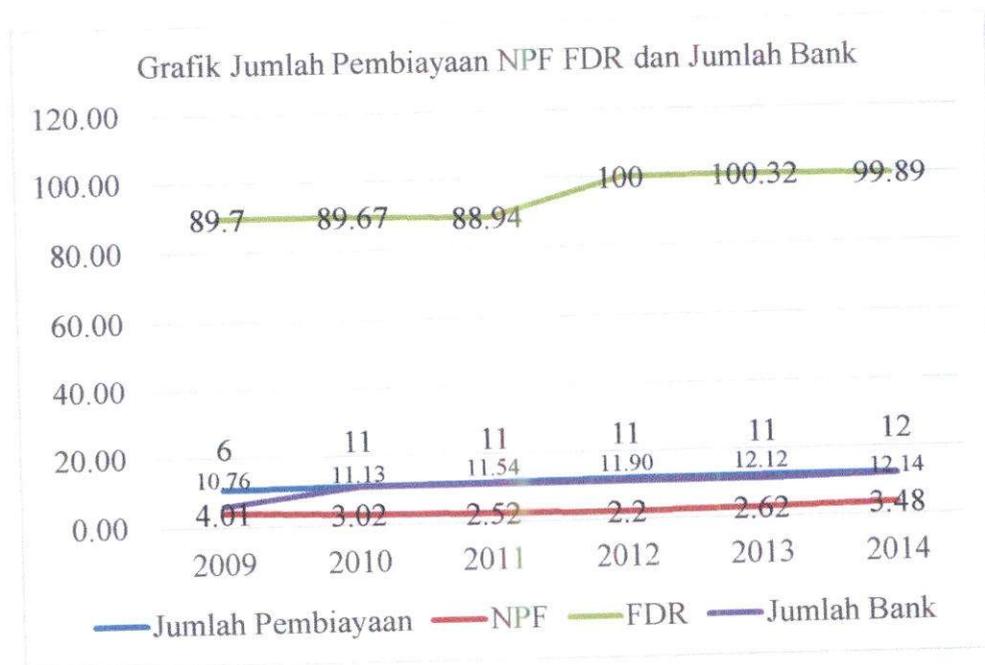
*) : tahun 2014 hingga bulan Juli.

Total Asset bank syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2008 asetnya sebesar 49,5 triliun rupiah hingga pada Bulan Juli 2014 aset bank syariah menembus 250,5 triliun rupiah Pencapaian aset bank syariah belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun dengan kemajuan total aset pada rentang waktu beberapa tahun ini, kita dapat melihat potensi bank syariah yang terus akan berkembang dan dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

Lembaga keuangan seperti perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan produk produk yang dikeluarkan oleh bank membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk konsumtif maupun penambahan modal untuk melancarkan usaha nasabah. Disisi lain,

dengan adanya kegiatan yang dilakukan tersebut, bank berkesempatan mendapatkan keuntungan sebagai timbal balik atas jasa yang diberikan. Dalam hal ini, bank mengandalkan pembiayaan sebagai sumber pemasukan. Semakin besar pinjaman yang diajukan, semakin besar pula keuntungan yang nantinya akan diperoleh bank. Berikut data mengenai jumlah penyaluran pembiayaan, pembiayaan bermasalah, FDR, dan jumlah kantor bank syariah :

Grafik 1.1
Pergerakan Jumlah Pembiayaan, FDR, NPF, dan Jumlah Bank.



Pada grafik diatas, pola jumlah pembiayaan semakin meningkat serupa dengan pergerakan FDR atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Kenaikan ini juga seiring dengan bertambahnya bank syariah pada tahun 2009 yang semula hanya terdapat 6 bank menjadi 11 bank sampai pada tahun 2013 dan bertambah satu lagi menjadi 12 bank syariah pada tahun 2014. Pada pembiayaan bermasalah Bank Syariah polanya sempat menurun

hingga tahun 2012 sebesar 2,2 persen dan mulai naik kembali hingga tahun 2014 menjadi sebesar 3,48 persen.

Upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian mencakup dari sisi moneter dan juga fiskal. Dalam hal kebijakan moneter, pemerintah mengandalkan Bank Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi. Sedangkan dalam hal fiskal, pemerintah berusaha menaikkan pendapatan negara, karena dengan meningkatnya pendapatan negara dapat diasumsikan kesejahteraan masyarakat pun juga ikut meningkat. Kemudian dengan adanya sistem perekonomian terbuka, pemerintah mulai menggiatkan lagi produksi dalam negeri sehingga dapat diekspor ke berbagai negara. Hal ini kemudian akan memberikan efek peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Berikut pergerakan variabel ekonomi (inflasi, *BI rate*, kurs, dan *GDP*).

Tabel 1.2

Pergerakan Variabel Ekonomi (inflasi, suku bunga, kurs, dan *GDP*)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Inflasi (%)	2.78	6.96	3.79	4.3	7.5	6.7
Suku Bunga (%)	6.5	6.5	6	5.75	7.5	7.5
Kurs (r)	9.400	8.991	9.068	9.670	12.189	12.158
<i>GDP</i> (%)	4.6	6.1	6.5	6.2	5.8	5.2
<i>NPI</i> (%)	4.01	3.02	2.52	2.2	2.62	3.48

Sumber : Laporan Tahunan Bank 2009-2014 (diolah) dan Laporan Badan Pusat Statistik

- (%) : Dalam persen
- (r) : Dalam satuan ribu rupiah
- (*) : Tahun 2014 sampai bulan juli

Pada tabel diatas, dapat dilihat inkonsistensi data variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs dan GDP. Untuk inflasi, penurunannya terjadi pada tahun 2011 sebesar 3.79 persen dari 6.96 persen dan pada tahun 2014 turun 0,8 persen menjadi 6.7 persen, selebihnya itu inflasi bergerak naik. Kemudian pada suku bunga, pemerintah menaikkan sebesar 1 poin dari tahun 2009-2014. Penurunan kebijakan suku bunga sempat terjadi pada tahun 2012. Kemudian pada nilai tukar rupiah terhadap dollar melonjak naik pada tahun 2012 dari Rp 9.670,00 menjadi Rp 12.198,00 pada tahun 2013. Sedangkan GDP terus naik dari tahun 2009-2012, dan berangsur angsur turun menjadi 5,2 persen pada bulan Juli 2014. Pada *Non Performing Financing* Bank Syariah, bergerak fluktuatif dan kondisi NPF paling kecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 2,2 persen dan kembali naik hingga tahun 2014 sebesar 3,48 persen.

Muta'mimah dan Siti (2012) berpendapat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan penelitian Ihda (2010) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian yang dilakukan Khemraj dan Pasha (2009) berpendapat bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet bank umum konvensional. Selanjutnya, Mutamimah dan Siti (2012) mengemukakan bahwa kurs berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPF. Namun penelitian Zakiyah dan Yulizar (2011) berpendapat laim bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap NPF bank syariah. Zakiyah dan Yulizar (2011) juga berpendapat bahwa IPI atau *proxy* dari pendapatan

nasional atau GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF bank syariah. Variabel makroekonomi yang telah dipaparkan di atas dapat mempengaruhi kinerja perbankan khususnya pembiayaan, dikarenakan keduanya saling berhubungan dengan permasalahan uang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mempunyai gagasan untuk meneliti pengaruh kondisi makroekonomi terhadap NPF bank syariah, mengingat kehadiran bank syariah yang tergolong baru di Indonesia ini mempunyai potensi yang lebih untuk mengembangkan sayapnya. Penelitian ini fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF di Indonesia, dikarenakan fluktuasi makroekonomi dikelola oleh otoritas moneter yang mengatur seluruh aktivitas perbankan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diajukan dengan judul **“Analisis Makroekonomi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia Periode 2009-2014.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat ketidak konsistenan data yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs, dan GDP sehingga keadaan seperti ini akan mempengaruhi pergerakan nilai *Non Performing Financing*.

Permasalahan kedua, adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Seperti perbedaan Mutamimah dan Siti (2010) yang mengemukakan adanya pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap NPF, sedangkan lhda (2011) mengemukakan tidak adanya pengaruh

inflasi terhadap NPF. Perbedaan hasil penelitian juga didapat dari variabel ekonomi yang lain.

Dari fenomena tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu :

1. Bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga, kurs dan GDP terhadap pembiayaan bermasalah secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga, kurs dan GDP terhadap pembiayaan bermasalah secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh masing masing variabel inflasi, BI *rate* , kurs, dan GDP terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di Indonesia secara parsial.
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh masing masing variabel inflasi, BI *rate*, kurs, dan GDP terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di Indonesia secara simultan.

D. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2009-Juli 2014. Serta adanya variabel makroekonomi yang digunakan terbatas pada inflasi, BI *rate*, kurs, dan GDP.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan kontribusi ilmu atas dasar pengembangan ilmunya yang didapat di program Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi peneliti, menjadi sumber referensi bagi peneliti yang sedang melakukan evaluasi atau mengatasi masalah yang sama dan memberikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi perbankan syariah, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan praktisi perbankan dalam hal meningkatkan pengawasannya terkait pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.